

**RENCANA KERJA
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PACET
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pacet 16

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 22

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja 33

5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan..... 34

5.3 Rencana Tindak Lanjut..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Pacet merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

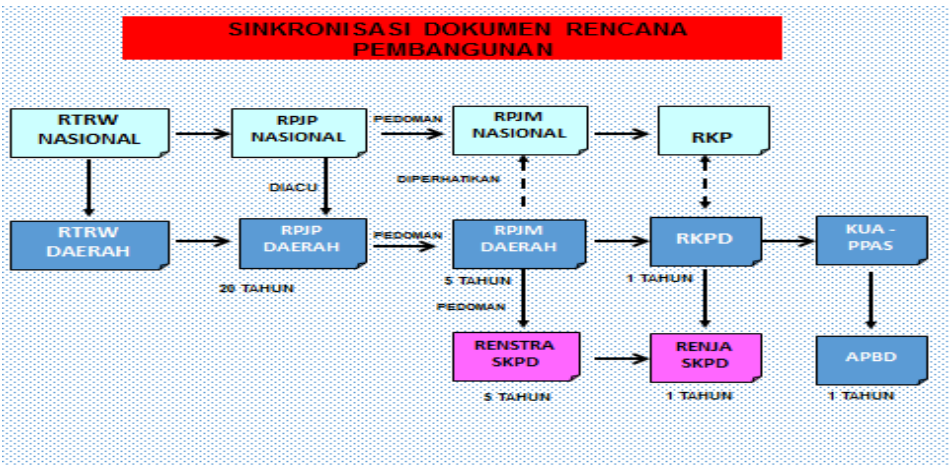
Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pacet yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Pacet adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pacet Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Pacet yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Pacet.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2026;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;

27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
31. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
32. Surat Keputusan Camat Pacet Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tim Penyusunan Renstra Kecamatan Pacet 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembangunan di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Pacet sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 Kecamatan Pacet ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pacet. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUSI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya
- Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Pacet pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1. (Tabel TC. 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Realisasi belanja pada Kecamatan Pacet Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan	%	Sisa
			(Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	12.500.000	100%	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100%	0
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100%	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.124.128.000,00	2.044.006.479,00	96,23%	80.121.521,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.124.128.000,00	2.044.006.479,00	96,23%	80.121.521,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.800.600,00	2.799.750,00	99,97%	850,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.500.000,00	27.470.000,00	99,89%	30.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	6.999.800,00	100,00%	200,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000,00	3.528.000,00	98,00%	72.000,00
	Penyediaan Bahan/Material	22.500.000,00	22.499.450,00	100,00%	550,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00%	0,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Mebel				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.000.000,00	25.614.438,00	98,52%	385.562,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.500.000,00	67.500.000,00	100%	0

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000,00	24.640.000,00		360.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	26.400.000,00	26.397.750,00		2.250,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	4.580.000,00		420.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK				
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	20.699.400,00	20.489.200,00	98,98%	210.200,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.699.400,00	20.489.200,00	98,98%	210.200,00
3	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	277.889.000	275.572.500	99,16%	2.316.500
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	37.400.000,00	37.000.000,00	98,93%	400.000,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	20.000.000,00	19.999.900,00	100,00%	100,00
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	42.740.000,00	42.619.000,00	99,72%	121.000,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	109.382.300,00	109.276.600,00	99,90%	105.700,00
		2.601.750.300,00	2.519.520.367,00	96,84%	82.229.933,00

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam

pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pacet

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2022 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai;	81%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kecamatan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	12 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	12 dokumen	12 dokumen	100
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	7 dokumen	7 dokumen	100

7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	5 dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	5 dokumen	5 dokumen	100
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang dapat tersusun sesuai ketentuan yang berlaku tepat waktu	90,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	90,00%	90,00%	100
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan	56 Laporan	n/a	n/a	n/a	n/a	56 Laporan	56 Laporan	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	65	n/a	n/a	n/a	n/a	65	65	100
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat dipenuhi	14 stel	n/a	n/a	n/a	n/a	14 stel	14 stel	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	90,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	90,00%	90,00%	100
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor selama 12 bulan	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100

7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan : kertas kop, amplop kop, lembar disposisi	1 paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material selama 12 bulan	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas dalam daerah 12 Bulan	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan	90,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	90,00%	90,00%	100
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Bulan	12 Bulan	100
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kerja pelayanan umum kantor sesuai kebutuhan	4 Tenaga Kerja	n/a	n/a	n/a	n/a	4 Tenaga Kerja	4 Tenaga Kerja	100
7.01.01.2.09	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	90,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	90,00%	90,00%	100
7.01.01.2.09.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dapat terpenuhi	1 Kendaraan Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kendaraan Dinas	1 Kendaraan Dinas	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	80,00%	n/a	n/a	n/a	n/a	80,00%	80,00%	100

7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pmrliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama 12 bulan	1 Kendaraan Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kendaraan Dinas	1 Kendaraan Dinas	100
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pajak kendaraan dinas yang dapat terbayar dalam 1 than	1 Kendaraan Dinas	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Kendaraan Dinas	1 Kendaraan Dinas	100
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	3 Unit	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Unit	3 Unit	100
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	1 Paket	n/a	n/a	n/a	n/a	1 Paket	1 Paket	100
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	81%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu	705 pelayanan	n/a	n/a	n/a	n/a	705 pelayanan	705 pelayanan	100
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	5 pelayanan	n/a	n/a	n/a	5 pelayanan	5 pelayanan	5 pelayanan	100
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	750 pelayanan	n/a	n/a	n/a	750 pelayanan	750 pelayanan	750 pelayanan	100

7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Kesejahteraan Masyarakat	81%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	24 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	24 Kegiatan	24 Kegiatan	100
7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat	12 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat	12 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
7.01.04	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	81%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100

7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	14 Kegiatan	14 Kegiatan	100
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu terselenggaranya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	12 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah waktu terselenggaranya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	2 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun bidang Pemerintahan	81%	n/a	n/a	n/a	n/a	81%	81%	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	26 Fasilitasi	n/a	n/a	n/a	n/a	26 Fasilitasi	23 Fasilitasi	100
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa	2 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100

7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	13 Kegiatan	13 Kegiatan	100
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100
7.01.06.2.01.16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3 Kegiatan	n/a	n/a	n/a	n/a	3 Kegiatan	3 Kegiatan	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indikator Kepala Daerah pada Misi 7 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Pacet Tahun 2025

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
			Nilai SAKIB Perangkat Daerah
			Rata-Rata Capaian Indikator Program :
			1. Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan
			2. Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Persentase Realisasi Perangkat daerah
			Indeks Profesionalisme ASN
			IKM Kecamatan

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Pacet
Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2021	2022	2023	2024	2026	2021	2022	2023	2024	2026	2021	2022	2023	2024	2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10				11				12	
1	IKM Kecamatan	-	-	80	81	82	83	84	79	80,03	91,5	-	-	80	81	82	83	84	
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	61	62	63	64	55	57,66	56,29	-	-	-	61	62	63	64	55	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	80,32	82,34	81,7	-	-	81	81,55	82,25	82,95	83,65	
4	Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	95,26 %	90,67	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
5	Persentase Realisasi Perangkat daerah	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	-	91,84 %	90	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
6	IP ASN Perangkat Daerah	-	-	69	70	71	72	73	-	69,7	76,44	-	-	69	70	71	72	73	
7	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standar pelayanan	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	65,03 %	97,41 %	82	-	-	80%	81%	82%	83%	84%	
8	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	97,15 %	97,13 %	82	-	-	81%	82%	83%	84%	85%	
9	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	-	-	755 Pelaya nan	755 pelaya nan	750 pelaya nan	750 pelaya nan	750 pelaya nan	1092 pelaya nan	3443 pelaya nan	3445 pelaya nan	-	-	755 pelaya nan	755 pelaya nan	750 pelaya nan	750 pelaya nan	750 pelaya nan	

10	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	-	-	23 Fasilita s	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	23 fasilita si	26 Fasilita si	26 Fasilita s	-	-	23 Fasilita s	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	24 Fasilita si	
----	---	---	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---	---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

2.3. Isu – Isu Penting

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Pacet diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1.4.1 Kondisi Internal

Kondisi Internal Kecamatan dipengaruhi 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Pacet.

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Adanya dukungan dana dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam rencana kerja dan dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pacet.
2. Penempatan SDM yang sesuai antara keahlian yang dimiliki dengan kebutuhan Organisasi
3. Adanya pembagian tugas yang jelas dari level camat sampai level pelaksana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto.
4. Adanya sistem dan prosedur kerja yang jelas dan sudah tertuang dalam SOP yang dibakukan serta disosialisasikan.
5. Adanya dukungan teknologi informasi yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas serta Sarana Prasarana yang memadai.
6. Adanya Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pengembangan Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan dalam memberikan terobosan dalam memberikan Pelayanan yang Prima kepada masyarakat.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Kurang tertibnya sistem administrasi kepegawaian.
2. Adanya kekosongan Jabatan Struktural yang mempengaruhi kinerja OPD.
3. Kurang optimalnya sistem dan prosedur tata kearsipan.
4. Kualitas SDM aparatur yang dimiliki masih belum optimal .
5. Kurangnya pemahaman akan tupoksi yang dimilikinya
6. Adanya beban kerja yang tidak merata

1.4.2 Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal Kecamatan juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor strategis yaitu Faktor Peluang Organisasi dan Faktor Tantangan Organisasi, karena berada diluar lingkungan kecamatan, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Pacet dan membutuhkan koordinasi serta kerjasama

dengan Instansi terkait, namun demikian keberadaan faktor eksternal dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan kinerja organisasi.

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Letak Kecamatan Pacet yang berada di daerah Pegunungan dengan panorama yang Indah memberi dampak positif ke warga masyarakat dalam mengembangkan Daerah Pacet menjadi daerah Wisata yang bisa meningkatkan perekonomian warga Pacet dan menjadikan Pacet sebagai Daerah Tujuan Wisata.
2. Kondisi Wilayah Kecamatan Pacet termasuk daerah yang subur, sehingga merupakan daerah yang prospektif dan produktif untuk pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan kegiatan lainnya.
3. Adanya perbaikan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto seperti perbaikan jalan poros, jalan lingkungan dan jembatan serta penerangan jalan sangat berpengaruh terhadap kegiatan transportasi dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat khususnya Wilayah Kecamatan Pacet ;
4. Keadaan masyarakat yang relatif kondusif sehingga mendukung pelaksanaan pembangunan dalam segala bentuk baik pembangunan fisik maupun mental spiritual.

B. Faktor Hambatan / Tantangan Organisasi

1. Kondisi Geografis Kecamatan Pacet yang menyebabkan letak desa - desa dengan jarak jangkauan yang jauh dan tersebar dari Kantor Kecamatan menyebabkan kurangnya koordinasi dan pemantauan wilayah di Lingkungan Kecamatan Pacet.
2. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.
3. Masih adanya aparatur yang kurang memahami penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada baik sehingga perlu banyak dilakukan pelatihan dan pembinaan khususnya SDM yang ada pada Perangkat Desa.
4. Kurangnya pemahaman dan pemanfaatan Digitalisasi yang mengharuskan segala aktifitas di Pemerintahan menyebabkan segala Transaksi melakukan metode

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2024-2024 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2024. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
 Reviw Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
 Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pacet

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pacet	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10 (A)	2.650.000.000,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Pacet	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,10 (A)	2.650.000.000,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	84%	11.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	84%	11.000.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.500.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	3.500.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.500.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	7.500.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	84%	2.124.128.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	84%	2.124.128.000,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pacet	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Dokumen	2.124.128.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pacet	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Dokumen	2.124.128.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	IP ASN Perangkat Daerah	73	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	IP ASN Perangkat Daerah	73	0	

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pacet	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	14 stel	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pacet	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	14 stel	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pacet	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Bimtek	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kecamatan Pacet	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Bimtek	0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	84%	105.600.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	84%	105.600.000,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	30.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	30.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	10.000.000,00	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	3.600.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	3.600.000,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	3.600.000,00	

	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	27.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	27.000.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	25.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pacet	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	84%	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Pacet	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	84%	0	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet		8 unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet		8 unit	0	
	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pacet	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	0			Jumlah Paket Mebel yang disediakan	3 Paket	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	84%	108.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	84%	108.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	27.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	27.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	81.000.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan	81.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	84%	74.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Pacet	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	84%	74.000.000,00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	29.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	29.000.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	5.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pacet	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	16 Unit	5.000.000,00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pacet	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	27.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Pacet	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	84%	27.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pacet	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1650 pelayanan	27.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Pacet	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	1650 pelayanan	27.000.000,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1650 pelayanan	27.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kecamatan Pacet	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan	1650 pelayanan	27.000.000,00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pacet	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	200.272.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Pacet	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	84%	200.272.000,00	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	24 fasilitasi	200.272.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	24 fasilitasi	200.272.000,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	37.400.000,00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 Dokumen	37.400.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	20.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pacet	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	20.000.000,00	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	35.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7 Dokumen	35.000.000,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	107.872.000,00	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pacet	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	14 Dokumen	107.872.000,00	
JUMLAH					2.650.000.000,00	JUMLAH					2.650.000.000,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3. Oleh sebab untuk menampung usulan dan kegiatan masyarakat yang ada dikecamatan Pacet melalui kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Kecamatan, hasil dari dua kegiatan tersebut hanya berupa fisik prasarana, yang bentuk kegiatannya tidak dilakukan oleh Kecamatan Pacet secara langsung melainkan membantu untuk menampung dan menyampaikan kepada dinas terkait.

Tabel TC.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024Kabupaten
Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Pacet

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti		
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Masjid	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Sapi	Hibah untuk Sapi Kurban

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Pacet ditujukan untuk meningkatkan nilai indeks pelayananan masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Adapun tujuan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2024 – 2026. Sasaran Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
- 2. Terwujudnya pelayanan public yang optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto pada 2024 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2026	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	61	65	67	68	70
			Nilai SAKIP Perangkat daerah	81	81,55	82,25	82,95	83,65
			Persentase Indikator Program Perangkat daerah yang tercapai sesuai target	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Persentase Realisasi Perangkat daerah	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2026	2026
			IP ASN Perangkat Daerah	81	82	83	84	85
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	81	82	83	84	85
			Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart Pelayanan	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	755 pelayanan	755 pelayanan	750 pelayanan	750 pelayanan	750 pelayanan
			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	23 Fasilitas	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi	24 Fasilitasi

3.3Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Pacet Tahun 2024 mengacu pada Tujuan Kecamatan Pacet yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pacet untuk 5 tahun mendatang yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan indikatif:
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
- c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel T-C. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah :
Kecamatan Pacet

Kod	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Pacet	81,10 (A)	3.501.003.650,00	APBD		81,10 (A)	3.501.003.650,00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	Kec. Pacet	84%	34.500.000,00	APBD		84%	34.500.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Pacet	7 Dokumen	17.250.000,00	APBD		7 Dokumen	17.250.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Pacet	11 Dokumen	17.250.000,00	APBD		11 Dokumen	17.250.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah	Kec. Pacet	84%	2.455.308.650,00	APBD		84%	2.455.308.650,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Pacet	38 Dokumen	2.455.308.650,00	APBD		38 Dokumen	2.455.308.650,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat Daerah	Kec. Pacet	73	50.945.000,00	APBD		73	50.945.000,00

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	Kec. Pacet	14 stel	16.445.000,00	APBD		14 stel	16.445.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Pacet	2 Bimtek	34.500.000,00	APBD		2 Bimtek	34.500.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	Kec. Pacet	84%	269.790.000,00	APBD		84%	269.790.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kec. Pacet	1 Paket	11.500.000,00	APBD		1 Paket	11.500.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pacet	9 Jenis	115.000.000,00	APBD		9 Jenis	115.000.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kec. Pacet	12 Paket	46.000.000,00	APBD		12 Paket	46.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kec. Pacet	12 Paket	17.250.000,00	APBD		12 Paket	17.250.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kec. Pacet	12 Dokumen	4.140.000,00	APBD		12 Dokumen	4.140.000,00
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Kec. Pacet	3 Paket	34.500.000,00	APBD		3 Paket	34.500.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pacet	12 laporan	41.400.000,00	APBD		12 laporan	41.400.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi	Kec. Pacet	84%	387.596.000,00	APBD		84%	387.596.000,00
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kec. Pacet	8 unit	330.096.000,00	APBD		8 unit	330.096.000,00

Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec. Pacet	3 Paket	57.500.000,00	APBD		3 Paket	57.500.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan	Kec. Pacet	84%	133.170.000,00	APBD		84%	133.170.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kec. Pacet	12 Laporan	37.950.000,00	APBD		12 Laporan	37.950.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kec. Pacet	12 laporan	95.220.000,00	APBD		12 laporan	95.220.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kec. Pacet	84%	169.694.000,00	APBD		84%	169.694.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kec. Pacet	1 Unit	54.050.000,00	APBD		1 Unit	54.050.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Kec. Pacet	3 Unit	103.500.000,00	APBD		3 Unit	103.500.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kec. Pacet	16 Unit	12.144.000,00	APBD		16 Unit	12.144.000,00
PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	Kec. Pacet	84%	63.825.000,00	APBD		84%	63.825.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec. Pacet	1650 pelayanan	63.825.000,00	APBD		1650 pelayanan	63.825.000,00
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	Kec. Pacet	1650 pelayanan	63.825.000,00	APBD		1650 pelayanan	63.825.000,00

dengan Nonperizinan	pada urusan Pemerintahan							
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Kec. Pacet	84%	552.000.000,00	APBD		84%	552.000.000,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat	Kec. Pacet	37 fasilitasi	552.000.000,00	APBD		37 fasilitasi	552.000.000,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Pacet	8 Dokumen	96.600.000,00	APBD		8 Dokumen	96.600.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Pacet	8 Dokumen	89.700.000,00	APBD		8 Dokumen	89.700.000,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pacet	7 Dokumen	143.750.000,00	APBD		7 Dokumen	143.750.000,00
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Pacet	14 Dokumen	221.950.000,00	APBD		14 Dokumen	221.950.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto tahun 2024, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2026
KECAMATAN PACET
KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD : 4.01.28
NAMA : KECAMATAN PACET
SKPD :

No	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR			LOKASI	APBD KAB Rp.	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME	TARGET			SKPD Terkait	Pagu (Rp)	KL	Rp.	D/T B/DAK
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 (A)	Kec Pacet	3.501.003.650,00	-	-	-	-	-
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target		83%	Kec Pacet	34.500.000,00	-	-	-	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	Kec Pacet	17.250.000,00	-	-	-	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		11 Dokumen	Kec Pacet	17.250.000,00	-	-	-	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah		83%	Kec Pacet	2.455.308.650,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN		38 Dokumen	Kec Pacet	2.455.308.650,00	-	-	-	-	-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			IP ASN Perangkat Daerah		72	Kec Pacet	50.945.000,00	-	-	-	-	-

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah penyediaan pakaian dinas PNS serta perlengkapannya	14 stel	Kec Pacet	16.445.000,00	-	-	-	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Bimtek	Kec Pacet	34.500.000,00	-	-	-	-	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan	83%	Kec Pacet	269.790.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Kec Pacet	11.500.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 Jenis	Kec Pacet	115.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Kec Pacet	46.000.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Kec Pacet	17.250.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	Kec Pacet	4.140.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Bahan/Material			Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	3 Paket	Kec Pacet	34.500.000,00	-	-	-	-	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	Kec Pacet	41.400.000,00	-	-	-	-	-

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang dapat dicukupi		83%	Kec Pacet	57.500.000,00	-	-	-	-	-
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					8 unit	Kec Pacet	133.170.000,00	-	-	-	-	-
		Pengadaaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang disediakan		3 Paket	Kec Pacet	57.500.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan		83%	Kec Pacet	133.170.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		12 Laporan	Kec Pacet	37.950.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan		12 laporan	Kec Pacet	95.220.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		83%	Kec Pacet	169.694.000,00	-	-	-	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya		1 Unit	Kec Pacet	54.050.000,00	-	-	-	-	-
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi		3 Unit	Kec Pacet	103.500.000,00	-	-	-	-	-

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		16 Unit	Kec Pacet	12.144.000,00	-	-	-	-	-
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	83%	Kec Pacet	63.825.000,00	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan		1600 pelayanan	Kec Pacet	63.825.000,00	-	-	-	-	-
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan		1600 pelayanan	Kec Pacet	63.825.000,00	-	-	-	-	-
3		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	83%	Kec Pacet	209.522.300,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat		37 fasilitasi	Kec Pacet	552.000.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		8 Dokumen	Kec Pacet	96.600.000,00	-	-	-	-	-

		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah DokumenSinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		8 Dokumen	Kec Pacet	89.700.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		7 Dokumen	Kec Pacet	143.750.000,00	-	-	-	-	-
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		14 Dokumen	Kec Pacet	221.950.000,00	-	-	-	-	-
									3.501.003.650,00					

BAB V

PENUTUP

1.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Pacet Tahun 2024 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Pacet, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Pacet, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

1.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri no 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
-

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Pacet Tahun 2024 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2. Rencana Kerja Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

1.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Pacet diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Mojokerto, 15 Januari 2024



CAMAT PACET

APRIANTO, SE,MM

Pembina

NIP. 19690422 198903 1 006